

**“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2000-2013”**

**Oleh**

Tria Dessi Putri<sup>1</sup>, Toto Gunarto<sup>2</sup>, Saimul<sup>2</sup>

<sup>1</sup>: Alumni Magister Ilmu Ekonomi  
<sup>2</sup>: Dosen FEB Unila

**ABSTRACT**

**“ANALYSIS OF EFFECT OF LOCAL OWN SOURCE REVENUE AND  
GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE  
PROVINCE OF LAMPUNG 2000-2013”**

*This study aims to analyze the influence of Local Government Expenditure and Local Own Source Revenue to GDP Lampung Province with the study period of 2000-2013, with the variables of Government Investment per labor (proxied by government spending towards capital expenditure), Private Investment per Labor (proxied through the realization of domestic and foreign per Labor) and the realization of the PAD (Regional Original Revenue) per worker labor. This research is simulated by the amount of government spending and the fact that the GDP result of Lampung province is very volatile and the value is far behind compared to other Provinces in the Sumatra Island in the same period of observation. This study uses time series data in 2000-2013 and using regression analysis "Ordinary Least Squares" (OLS) use the Eviews Software. The findings of this study indicate that the labor force, private investment (domestic and foreign) and local government spending made a positive impact on development of the GDP Lampung Prvince.*

*The results showed that the Government Investment per labor (proxied by government spending towards capital expenditure) in the period 2000-2013 has a positive and significant impact on economic growth to economic growth Lampung Province. Private Investment per Labor (proxied through the realization of domestic and foreign per Labor) in the period 2000-2013 has a positive and significant impact on economic growth Lampung Province. realization of the PAD (Regional Original Revenue) per worker labor in the period 2000 to 2013 has a negative and significant impact on economic growth Lampung Province. In an effort to increase the GDP, Lampung policy is needed to encourage interest investment for investing in the area. Development efforts*

*should be directed to activities that are labor intensive to be able to absorb the labor force as much as possible. As well as appropriate fiscal policies in order to improve revenue realization. In the end, the role of local government through government spending to stimulate increased investment and variable absorption of the labor force is expected to increase local economic activity in order to achieve economic growth and increase capita income of the people.*

**Keywords:** PDRB, APBD, OLS, Government Spending, Economic Development

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya.

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi *rill* melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA), 2) Barang-barang

modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu dalam analisis makro dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional *rill* yang dicapai. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian yaitu : *konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan export netto* (ekspor dikurangi impor).

Pengukuran dalam perekonomian di suatu negara adalah produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB *Rill*) Sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan *rill* yang terjadi karena adanya pertambahan produksi (Mankiw : 2007).

Nilai PRDB Provinsi Lampung pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi lain di pulau Sumatera. Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam dan prasarana penunjang relatif sama dengan provinsi lain. Bahkan Provinsi Lampung dinilai memiliki arti strategis tersendiri sebagai kota penghubung antar pulau. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti

kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2007-2013 mengalami pertumbuhan yang positif. Terjadi peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pencapaian hasil-hasil pembangunan sangat dirasakan masyarakat merupakan *agregat* pembangunan dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang tidak terlepas dari usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang terlihat pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2009-2013 Provinsi Jambi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 8 %. Sementara itu Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 5,89 % dan pada tahun 2012 laju pertumbuhan provinsi Lampung tertinggi selama periode 2007-2013, yaitu sebesar 6,48 % atau mengalami kenaikan 0,09 % dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 5.97 % atau sebesar 0.51 % dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi se-Sumatera Tahun 2007-2013 (Dalam Persen)**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1, Aceh	-2.36	-5.24	-5,51	2,79	5,02	5,2	4.18
2, Sumatera Utara	6.90	6.39	5,07	6,35	6,58	6,22	6.01
3, Sumatera Barat	6.34	6.88	4,28	5,93	6,22	6,35	6.18
4, Riau	3.41	5.65	2,97	4,18	5,01	3,55	2.61
5, Jambi	6.82	7.16	6,39	7,35	8,54	7,44	7.88
6, Sumsel	5.84	5.07	4,11	5,63	6,5	6,01	5.98
7, Bengkulu	6.46	5.75	6,43	6,06	6,4	6,61	6.21
8, Lampung	5.94	5.35	5,26	5,85	6,39	6,48	5.97
9, Bangka Belitung	4.54	4.60	3,74	5,93	6,4	5,72	5.29
10, Kepulauan Riau	7.01	6.63	3,52	7,19	6,67	8,21	6.13

Sumber : Lampung Dalam Angka 2007-2013, Badan Pusat Statistik

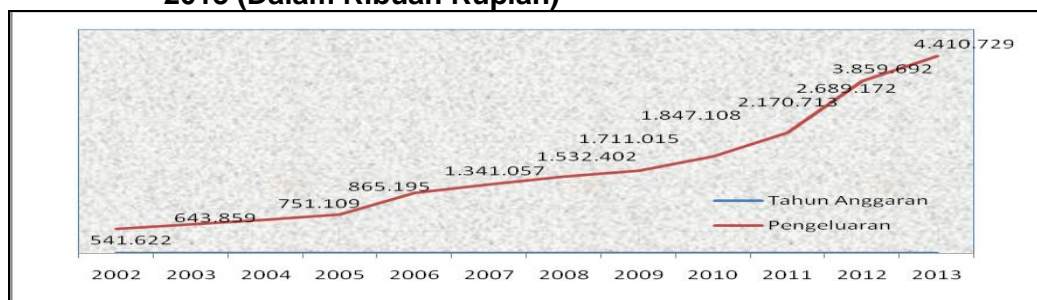
Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang

proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi subjek penting untuk dianalisis. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastruktur fisik atau *human capital*, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah, (Sodik : 2007).

Dalam perekonomian modern, Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun rumah tangga, (Hidayat : 2010). Untuk itulah diperlukan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam satu perekonomian dan hanya untuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sukirno (2013), Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung dapat di lihat pada Gambar 1 berikut ini.

**Gambar 1. Grafik Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2002-2013 (Dalam Ribuan Rupiah)**



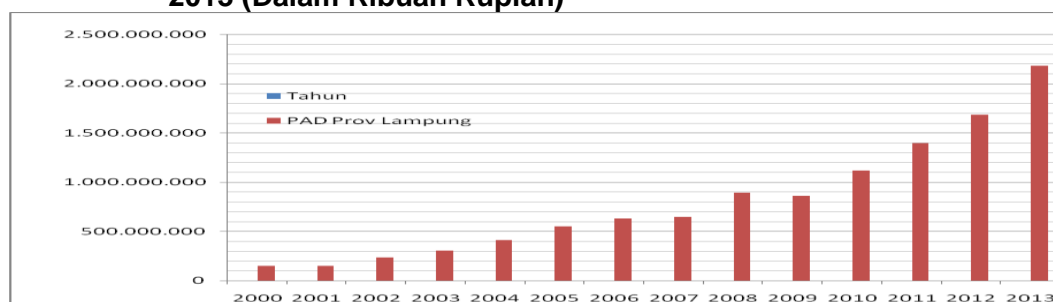
Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Data Diolah)

Dari grafik yang disajikan terlihat bahwa Pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Total pengeluaran tertinggi jelas terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4.410.729.851 seiring dengan semakin meningkatnya belanja daerah Provinsi Lampung dari tahun ketahun. Terkait dengan adanya kebijakan fiskal pemerintah yaitu otonomi daerah, maka baik penerimaan serta pengeluaran lebih dapat dioptimalkan dikarenakan tiap-tiap daerah dapat mengelola sumber daya yang ada. Menurut Permendagri 13 tahun 2006, Pengeluaran pemerintah daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Pemerintah daerah melalui upaya memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya adalah meningkatkan perekonomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Pada gambar 2 akan dijelaskan bagaimana gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013.

Berdasarkan grafik di bawah ini dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan PAD tersebut dinilai tidak signifikan. Nilai PAD terbesar diperoleh pada tahun 2013 sebesar 2,183,413,479.000 dan mengalami peningkatan yang relatif signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

**Gambar 2. Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000-2013 (Dalam Ribuan Rupiah)**



Sumber : DJPK (2000-2013)

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Realisasi Investasi Pemerintah (Belanja Modal) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013?
2. Bagaimana Pengaruh Realisasi Investasi Swasta yaitu realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013 ?
3. Bagaimana Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013 ?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah (Belanja Modal) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Realisasi Investasi Swasta yaitu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi Propinsi Lampung tahun 2000-2013.

**Hipotesis**

Diduga secara bersama-sama Jumlah, Realisasi Nilai Investasi Pemerintah (Ip) Pertenaga Kerja, Realisasi nilai Investasi Swasta (Is) Pertenaga Kerja dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pertenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Perkembangan Ekonomi (PDRB) Pertenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2000-2013.

**Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi pemerintah pertenaga kerja, investasi swasta pertenaga kerja dan realisasi pendapatan asli daerah pertenaga kerja terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Lampung periode Tahun 2000 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah yang diproksi

melalui realisasi belanja modal pemerintah, Investasi Swasta (Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN) dan Pendapatan Asli Daerah.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat : 2010). Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Teori Wagner dan Pengikutnya

Dari persamaan empiris yang dilakukan oleh Adolph Wagner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Wagner mengukur pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan hukum wagner dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt-1}{YpCt-1} > \frac{GpCt-2}{YpCt-2} \rightarrow \frac{GpCt-n}{YpCt-n}$$

dimana :

GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita

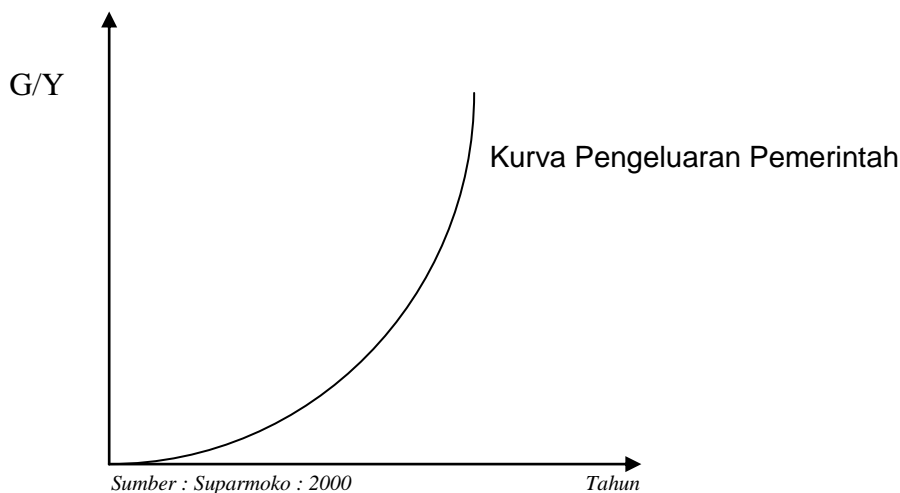
YpC : Pendapatan nasional Per kapita

t : Indeks Waktu

Disamping itu menurut wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) Perkembangan demokrasi dan (5) ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Suparmoko : 2000). Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Sejalan dengan



itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3 di atas, secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto :1994).



Terdapat kelemahan dari hukum Wagner tersebut yakni tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Hal ini disebabkan karena Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai pemerintah (*Organic Theory Of The State*). Yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lain.

## 2. Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y = C + I + G + X - M$  merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melamahkan kegiatan pihak swasta.

Tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima (2) pertimbangan-perimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan wijaya dalam suparmoko (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah maupun efek penggandaan (*multiplier effect*) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*).

## Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menurut Bastian (2006), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun takwim dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”. Sementara menurut Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Pertimbangan Pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, proporsional dan tidak terkonsentrasi di daerah tertentu menjadi tolak ukur dalam pendanaan pemerintah pusat ke daerah. (modul 2 : Pendapatan Daerah, KKD 2013).



Pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan dari kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Namun *performance* suatu perekonomian tentu tidak semata-mata karena pengaruh dari kebijakan fiskal tersebut. Akan tetapi *Performance* perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari sejauh mana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi kesenjangan di masyarakat. Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan infrastruktur fisik, dapat

mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkan, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil.

### **Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan". Menurut Todaoro (2013) menyatakan bahwa pembentukan modal swasta atau lebih sering dinyatakan sebagai investasi pada hakekatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari.

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran *agregat*, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan *agregat*, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Investasi swasta di Indonesia

dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

### **Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi**

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah (BPS : 2012). Dalam suatu proses pembangunan ekonomi mencakup aktifitas ekonomi yang mengupayakan pengoptimalan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia sehingga menciptakan nilai ekonomis, salah satu faktor ekonomi yang dimaksud adalah tenaga kerja. Robert Solow, mengemukakan pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Solow mengkritik formulasi harod-domar dari kelompok Keynesian yang hanya menggunakan pendekatan akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang secara ekonomi mampu bekerja dan berproduktivitas untuk dapat menghasilkan suatu nilai tambah dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkannya. Dengan demikian, pengertian angkatan kerja tidak lain merupakan pengertian dari tenaga kerja. Di mana tenaga kerja merupakan suatu input dari proses produksi yang akan memberikan kontribusi yang positif terhadap output *agregat* suatu wilayah baik dari sudut pandang pengeluaran maupun produksi. Sehingga terdapat hubungan yang positif antara jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Teori Pertumbuhan Solow dan Swan**

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow dan Swan (1956). Dengan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi

kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara *capital* (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.

Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam model Solow terdapat empat variabel penting, yaitu *output*, *capital*, *labor* dan *knowledge*, dimana  $Y(t) = F [ K(t), L(t), A(t) ]$

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan dari periode 2000-2013. Data yang dihimpun berasal dari publikasi dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDRB Provinsi Lampung dan data ketenagakerjaan Provinsi Lampung, publikasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia ([djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id)) mengenai realisasi APBD Provinsi Lampung, Badan Koordinasi Perizinan dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Lampung mengenai data realisasi investasi swasta (Realisasi PMA dan PMDN), serta berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, publikasi ilmiah di internet, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Definisi Operasional Variabel**

Beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto**

adalah besaran dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, atau

merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan seluruh unit kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi dan ekspor. Sedangkan menurut McEachern (2000:146), GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Data PDRB digunakan adalah PDRB Propinsi Lampung atas harga konstan tahun 2000 tanpa migas. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. dan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa periode 2000-2013 dikeluarkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

## **2. Investasi Pemerintah**

adalah realisasi total belanja modal daerah Tahun 2000-2013 di Propinsi Lampung, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

## **3. Realisasi Nilai Investasi Swasta**

adaalah realisasi penanaman modal asing (PMA) dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013, dinyatakan dalam satuan rupiah.

## **4. Tenaga Kerja**

Adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013, dinyatakan dalam satuan orang.

## **Model Analisis**

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi *agregat* standar.

$$Y = (K,L).....(1)$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

Dimana output (Y) dipengaruhi oleh input Kapital (K) dan Labor (L). Dengan memperhatikan faktor regional (dalam hal ini PAD Provinsi Lampung) dan Kapital didekati (proxy) investasi pemerintah (IP) dan Investasi Swasta (IS) Pemerintah Provinsi Lampung, maka model solow dapat ditulis menjadi :

$$PDRB = f(IP, IS, PAD, TK) \dots \dots \dots (2)$$

Untuk mendapatkan fungsi produksi perpekerja, maka semua variabel dibagi dengan TK, maka model Solow dengan modifikasi adalah sebagai berikut:

$$PDRB/TK = f(IP/TK, IS/TK, PAD/TK) \dots \dots \dots (3)$$

Dengan asumsi bahwa hubungan antar variable pada persamaan 3 tidak linear, maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi :

$$PDRB/TK = (IP/TK)^{\beta_1} (IS/TK)^{\beta_2} (PAD/TK)^{\beta_3} \dots \dots \dots (4)$$

Agar persamaan 4 dapat diaplikasikan maka persamaan tersebut

ditransformasikan menjadi bentuk log yaitu :

$$\text{Log}(PDRB/TK) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(IP/TK) + \beta_2 \text{Log}(IS/TK) + \beta_3 \text{Log}(PAD/TK) \dots \dots \dots (5)$$

Karena variabel terikat tidak hanya dipengaruhi oleh dua variabel bebas pada persamaan 1, tetapi masih ada variabel lain yang ikut mempengaruhi variasi nilai variabel terikat, maka keterkaitan antar variabel terikat dan variabel bebas pada persamaan 5 dapat ditulis dalam model ekonometri, yakni regresi linear berganda dapat ditransformasikan sebagai berikut :

$$\text{Log}(PDRB/TK) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(IP/TK) + \beta_2 \text{Log}(IS/TK) + \beta_3 \text{Log}(PAD/TK) + et \dots \dots \dots (6)$$

**Dimana :**

- $\beta_0$  : Tetapan (Konstansta)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$  : Nilai koefisien regresi parsial
- PDRB/TK : Perkembangan ekonomi pertenaga kerja yang diproksi dengan perkembangan PDRB/TK Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2000-2013 (Dalam jutaan rupiah) sebagai variabel terikat.
- IP/TK : Perkembangan Investasi Pemerintah pertenaga kerja (Pengeluaran untuk belanja modal/pembangunan) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2000-2013 (Dalam juta rupiah) sebagai variabel bebas.
- IS/TK : Perkembangan Investasi swasta pertenaga kerja Provinsi Lampung (Dalam jutaan rupiah) Tahun 2000-2013 sebagai variabel bebas.
- PAD/TK : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pertenaga kerja (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2000-2013 sebagai variabel bebas
- et : error term

## Hasil Perhitungan

Hasil pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *eviews.6* yang menghasilkan regresi linear berganda seperti yang terdapat pada lampiran 1. ditunjukkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LOG(PDRB\_TK)} = 15.66278 + 0.423075\text{LOG(IP\_TK)} + 0.097007\text{LOG(IS\_TK)} - 0.4460\text{LOG(PAD\_TK)}$$

t hitung	[19.54149]	[8.565085]	[2.430993]	[-3.714872]
Prob	[0.00000]	[0.00000]	[0.0354]	[0.0040]

Dengan penjelasan hasil regresi sebagai berikut :

**Tabel 2 : Penjelasan Hasil Uji Regresi**

Uji	Nilai	Keterangan
R-squared	0.946289	Menunjukkan kemampuan model. Variabel independent mampu menjelaskan pengaruhnya sebanyak 94,62% terhadap variabel dependent.
Prob(F-statistic)	0.000001	Probabilitas nilai uji F-statistik.
Durbin-Watson stat	1.993717	Nilai Durbin Watson yang digunakan untuk mengetahui apakah ada autokorelasi.

(\* Signifikan pada level 5 %)

## Pembahasan dan Implikasi Hasil

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh seperti yang terdapat pada lampiran 1, maka analisis pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Investasi Pemerintah Pertenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil persamaan regresi menunjukkan variabel investasi pemerintah yang diproksi dengan belanja modal *rill* secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yakni sebesar 0.423 ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan. Hubungan yang positif ini dapat diartikan bahwa dengan dengan meningkatnya pertumbuhan investasi pemerintah provinsi Lampung sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 0,4230 persen, *ceteris paribus*.

Adanya pengaruh positif ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Suparta dan Awaludin (2010). Hal ini mengindikasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Lampung secara bijak telah mengalokasikan anggarannya untuk investasi pada berbagai sektor baik



itu pada pembangunan sarana maupun prasarana yang menunjang pembangunan.

Investasi pemerintah yang dimaksud dalam hal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dalam APBD untuk belanja modal atau pembangunan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal yang ada di Provinsi Lampung terhadap pembangunan dinilai bersifat ekspansif, yang berarti apabila pengeluaran pemerintah semakin meningkat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Suparmoko, 2000). Investasi pemerintah dapat berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Peningkatan investasi pemerintah akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Namun demikian investasi pemerintah yang dikeluarkan hendaknya tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas pembangunan yang diharapkan. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang memihak kepentingan publik dapat memicu masuknya pihak swasta yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sehingga hal tersebut turut memberikan andil dalam menjaga eksistensi Pemerintahan Provinsi Lampung.

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Secara teori pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi global yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam perekonomian suatu negara tidak bisa dengan hanya mengandalkan sektor swasta. Kontribusi sektor pemerintah juga sangat diandalkan. Terutama faktor pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan nett ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.

## **2. Pengaruh Investasi Swasta Pertenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Hasil persamaan regresi menunjukkan variabel investasi swasta yang diproksi dengan realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, yakni sebesar 0.0970. Ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan. Hubungan yang positif ini dapat diartikan bahwa dengan dengan meningkatnya pertumbuhan investasi swasta provinsi Lampung sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 0.0970 persen, *ceteris paribus*

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan *views* 6. Investasi swasta (PMA dan PMDN) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) dan I Gusti Ayu Wahyuni (2012) serta didukung oleh teori bahwa akumulasi modal atau tambahan bersih terhadap stock capital didefinisikan sebagai investasi. Peningkatan investasi mendorong peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan produktivitas yang menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Muana Nanga, 2011).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama Tahun 2000-2013, investasi swasta menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini menunjukkan naiknya investasi di Provinsi Lampung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu secara statistik dapat terlihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja modal (Realisasi Investasi Pemerintah) masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total Realisasi Investasi Swasta. Sehingga hal ini berarti secara tidak langsung, Pemerintah Provinsi Lampung masih sangat bergantung terhadap peran swasta dalam pembangunan. Investasi merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena semakin besar investasi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta yang menunjang program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

menyebabkan pendapatan regional dari sembilan lapangan usaha yang ada di Provinsi Lampung menjadi meningkat, sehingga pertumbuhan ekonominya pun meningkat. Soekarni dkk (2010) berpendapat kenaikan ini merupakan pemberlakuan paket kebijakan perbaikan iklim investasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2006 serta pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, seperti dalam penyederhanaan birokrasi dalam Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan, peninjauan terhadap Perda-Perda yang menghambat investasi, Penegasan Masalah Amdal, dsb.

### **3. Pengaruh PAD Pertenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, dengan koefisien sebesar -0.4460 hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Lampung memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo dalam Fisanti (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber yang terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Provinsi Lampung tidak berjalan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrian :2014 dalam jurnal ilmiahnya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Se Jawa Timur yang menemukan adanya hubungan yang negatif antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Dari realisasi Penerimaan APBD Provinsi Lampung, terlihat bahwa masih besarnya dana transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Lampung tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum optimalnya pendapatan/laba BUMD dimana sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitikberatkan pada perolehan pajak dan retribusi daerah. Begitu pula

pada struktur pengeluaran APBD Provinsi Lampung yang masih didominasi oleh belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dibandingkan dengan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Lampung.

PAD merupakan indikator yang menjadi barometer kesuksesan desentralisasi fiskal di Indonesia (Suparta dan Awaludin :2011). Provinsi Lampung diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhannya melalui alokasi sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pertumbuhan yang terjadi di daerah seharusnya didukung oleh kuatnya PAD, karena pada PAD terkandung unsur pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri. Di dalam perekonomian, pemungutan pajak kepada masyarakat memiliki dua dampak. Di satu sisi, dengan dikenakannya pajak maka pendapatan daerah tersebut semakin tinggi. Di sisi investor dan masyarakat, pengenaan pajak dinilai memberatkan masyarakat karena akan mengurangi pendapatan masyarakat dan dunia usaha. Keadaan seperti ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak kepada masyarakat bersifat kontraktif, yaitu dengan semakin tingginya pajak yang dikenakan kepada masyarakat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.

Pengaruh negatif ini hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dalam menciptakan dan menentukan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Penciptaan dan pengenaan pajak dan retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan kepentingan publik. Berdasarkan pengujian data yang ada bahwa kebijakan fiskal yang relatif sesuai adalah kebijakan fiskal ekspansif (menurunkan pajak) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Untuk itu pemerintah Provinsi Lampung hendaknya lebih memperhatikan lagi undang-undang yang mengatur tentang PAD dan kriteria-kriteria penilaian Pendapatan Asli Daerah yaitu kriteria hasil (*yield*), kriteria keadilan (*equity*), kriteria efisiensi ekonomi, kriteria kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk memungut PAD melebihi penerimaan daerah sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi tidak efisien,

yang pada akhirnya mempengaruhi kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Widayat (1995) dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

### **Keterbatasan Penelitian**

Rentang waktu periode penelitian yang digunakan hanya 14 tahun, dikarenakan sulitnya memperoleh data. Selain itu, dalam pemilihan variabel terdapat beberapa variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Arusha V Cooray:2004 yang menggunakan indikasi IPM (*Human Development Index*) dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara, dan Mubarq et.al (2013) dalam penelitiannya menggunakan variabel kemandirian daerah sebagai ukuran dari keberhasilan desentralisasi fiskal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Investasi Pemerintah (Belanja Modal Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
2. Investasi Swasta (Realisasi PMA dan PMDN Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
3. Penerimaan Asli Daerah (PAD Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

## Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Karena pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka disarankan agar Investasi Pemerintah Provinsi Lampung pada penyerapan belanja modal yang dinilai telah cukup baik hendaknya lebih ditingkatkan pada proporsi belanja yang senantiasa mengedepankan kepentingan publik seperti dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini bertujuan agar tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

Selain itu, dalam penggunaannya, Belanja Modal harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Mengingat masih banyaknya potensi daerah Provinsi Lampung yang dapat dikembangkan maka disarankan agar investasi swasta kiranya bisa lebih ditingkatkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran (pengeluaran pemerintah) dalam menunjang pembangunan. Selain dapat menyerap porsi tenaga kerja yang lebih besar, Investasi Swasta turut memberikan andil di dalam pembangunan Provinsi Lampung. Perlu adanya kemudahan izin dalam iklim investasi di provinsi Lampung serta ketegasan regulasi yang menjadi batasan rambu bagi perusahaan PMA dan PMDN dalam berinvestasi di Provinsi ini, seperti masalah pengelolaan AMDAL, dsb, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2006 serta pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya memberi perhatian yang lebih mendalam untuk *mereview* kriteria Pendapatan Asli Daerah dari sudut pandang kepentingan publik. Penciptaan sumber-sumber PAD baru secara relatif akan lebih baik daripada peningkatan tarif pajak dan dari sumber-sumber penerimaan lainnya. Pengenaan pajak serta retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemampuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan publik.

4. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga masih dimungkinkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan kajian mendalam, seperti penambahan variabel, periode penelitian, cakupan daerah dan wilayah penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Tarmizi, 2010. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal e-Mabis FE Unimal Volume 3.
- Arsyad, Lincolin. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
- (BPS) Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2002-2013. Lampung Dalam Angka. BPS, Bandar Lampung.
- Boediono. 1992. Ekonomi Moneter, edisi 3 . BPFE : Yogyakarta.
- Cooray, Arusha., 2009. "Government Expenditure, Governance and Economic Growth". Working Paper No 4. Administration Federale Des Finances, Bern, Germany. (University of Wollongong).
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ernita, Dewi 2013 Jurnal Kajian Ekonomi "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia"
- Fiskal, Badan Analisis. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kelompok Kerja Badan Analisis Fiskal
- Gujarati, damodar. 2012. *ekonometrika dasar*. Jakarta, erlangga (Alih Bahasa: Drs. Ah. Sumarno Zain, MBA).
- Jhinghan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A.J Januardy. Hidayat,. 2010. Analisis Struktur Perekonomian di Kota Manado. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Samratulangi
- Jamzani sodik. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: studi kasus data panel di Indonesia. *Jurnal ekonomi pembangunan*. UPN "veteran" yogyakarta.
- Kumalasari, Reta, Saleh Samsubar. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970 – 2003 (Kajian dari Sisi Fiskal)*.
- Laporan Belanja Pemerintah tahun 2000 – 2011, Departemen Keuangan dalam Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
- Laporan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2000 – 2011, Badan Pusat Statistik
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *pengantar ekonomi*. Edisi kedua. Jilid 2. alih bahasa, haris munandar . erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N.G.. Makroekonomi. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.2007.
- Michel F Todaro, Stephen C Smit. *Pembangunan Ekonomi* edisi 11 Jilid 1 . Jakarta : Erlangga, 2011.
- Mardiasmo. 2002. *otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Penerbit andi, yogyakarta.

- Mita Ayu, Utami. 2012. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Study Kasus di Pemkot Tasikmalaya). : FE Universitas Siliwangi.
- Modul eviews 6, 2011. Unit Pengembangan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. 1993. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Jakarta: Erlangga
- Nanga, Muana. 2011 Makroekonomi : teori, masalah dan kebijakan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Permendagri No 13 Tahun 2006
- Rustiono, Dedi 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah” Tesis.
- Robert J. Barro. Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics , Vol. 106, No. 2. (May, 1991).
- Ruliansyah, Denny dkk 2004. *Analisis Hubungan Antara PDRB, realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan kesempatan kerja di provinsi Kalimantan Timur*. Kaltim : FE Universitas Mulawarman
- Supono Praseto, MA. MBA . 2001. *Model Pertumbuhan Neoklasik : Penerapannya Untuk Pertumbuhan Regional di Indonesia*. Yogyakarta :FE UGM
- Sukirno, Sadono. 2013. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Silvia Enggla Desnim, dkk .2013”Jurnal kajian Ekonomi Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Investasi di Indonesia.
- Singgih Santoso. 2002. *SPSS Versi 11.5* Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia
- Suparta, I Wayan dan Awaludin 2011”*Aplikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar lampung*” FEB, Unila Lampung.
- Suparmoko, M. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. BPFE Yogyakarta.Yogyakarta.
- Suminto. 2004. Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Jakarta : Ditjen Anggaran, Depkeu.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis . Bandung : Alfabeta
- Tamtomo Edi, Analisis pertumbuhan Daerah di Era Desentralisasi FE UI, 2010.
- Thomas Stratmann, Gabriel Lucjan Okolski | Jun 10, 2010 Does Government Spending Affect Economic Growth?. Mercatus Center. George Mason University.
- Tim Penyusun “Modul Pendapatan daerah” Kursus Kuangan daerah :2013
- Tarmidi, Lepi T Ekonomi pembangunan/Lepi T. Tarmidi Jakarta : PAU-EK-UI, 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Universitas Lampung. 2011. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto. 2006. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



Widarjono, Agus .2013 .*Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasi*, Edisi Keempat. Yogyakarta :UPP STIM YKPN

Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005

**Sumber Lain:**

<http://www.anneahira.com/teori-pertumbuhan-ekonomi>

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.djpu.go.id](http://www.djpu.go.id)

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>